

LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN ANGGARAN 2018

KANTOR CAMAT SUNGAI LOBAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KECAMATAN SUNGAI LOBAN

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Visi dan Misi Kecamatan Sungai loban
- 2.3 Arah Kebikan Umum dan strategi
- 2.4 Tujuan dan Sasaran
 - 2.4.1 Tujuan.....
 - 2.4.2 Sasaran.....
- 2.5 Prioritas Kegiatan
- 2.6 Perencanaan Kinerja.....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....
- 3.2 Evaluasi dan analisis Pencapaian Sasaran.....
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan.....
- 3.4 Analisis Efesiensi Kinerja Kegiatan.....

BAB IV. PENUTUP

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kerja Tahunan SKPD Tahun 2018
- Laporan Kinerja Interim/Triwulan
- Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut “*good governance*” (pemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk

pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka

LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2016-2020, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKj Tahun 2018 berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Loban yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKj ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2018. Pelaksanaan penyusunan LKj Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 dengan memperhatikan kepada peraturan perundangundangan yang melandasi pelaksanaan LKj, yaitu :

- a. Undang-undang No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- e. Peraturan bupati nomor 43 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dilingkungan pemerintahan kabupaten tanah bumbu;
- f. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Kecamatan Sungai Loban adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan penunjang Kabupaten Tanah Bumbu.

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Prasarana dan Sarana Umum;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan Camat

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas Umum Pemerintah

Camat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi :

- 1) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- 4) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- 7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

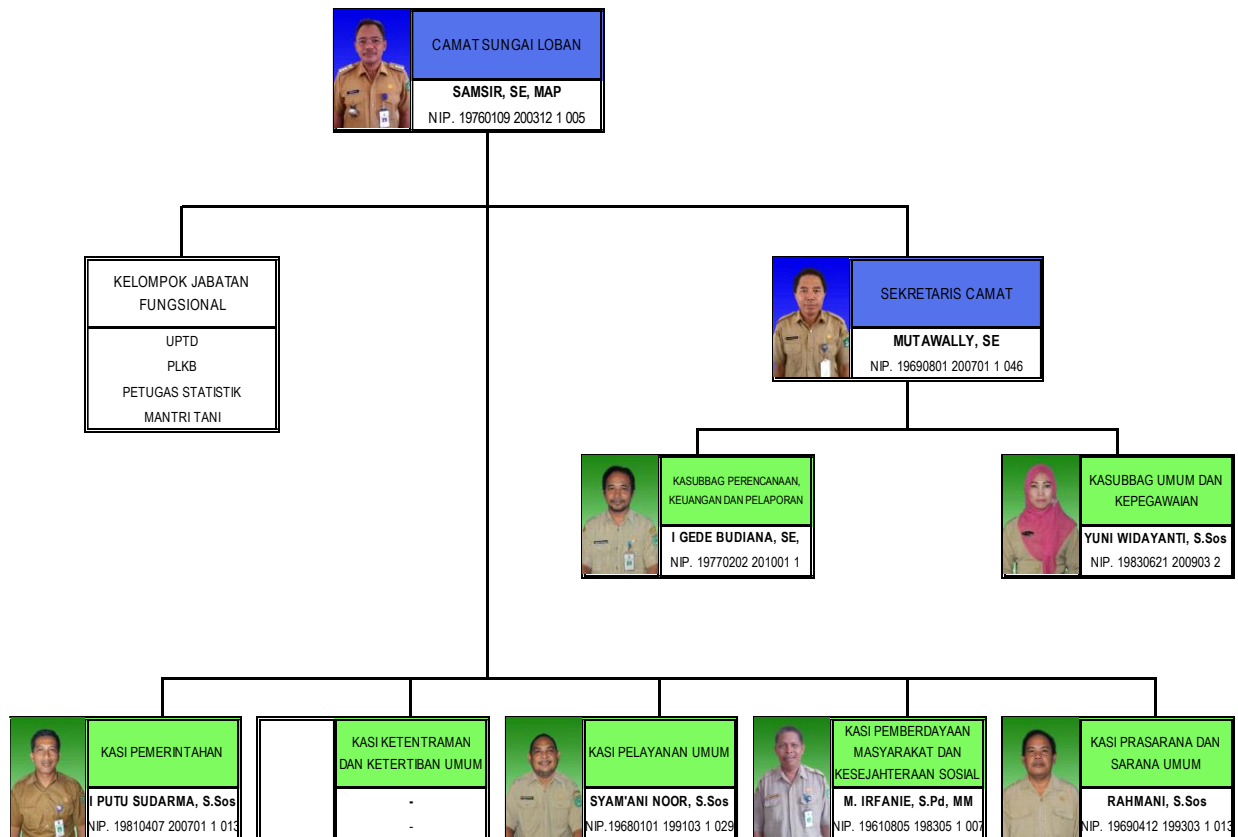
Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- 1) perizinan
- 2) rekomendasi;
- 3) koordinasi;
- 4) pembinaan;
- 5) pengawasan;
- 6) fasilitasi;
- 7) penetapan;
- 8) penyelenggaraan; dan
- 9) kewenangan lain yang dilimpahkan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sungai Loban, 28 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN SUNGAI LOBAN
DESEMBER 2018



Sungai Loban, 09
Januari 2019
Camat Sungai
Loban,



SAMSIR, SE, M.AP
Penata Tk. I
NIP.19760109
200312 1 005

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang ditetapkan oleh Kecamatan Sungai Loban selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik”

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	
			2016	2021
1	Terwujudnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Pelayanan	80 %	95 %

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Sungai Loban adalah :

1. Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Meningkatnya Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan kenyamanan di Masyarakat.

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI (%)			TARGET (%)	
		2016	2018	2018	2019	2020
Persentase Desa dengan Administrasi Baik	Persentase Desa dengan Administrasi Baik	70	75	80	100	98
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	90	100	99
Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan kenyamanan di Masyarakat	Cakupan wilayah tertib K3	100	100	100	100	100

2.1.2. Strategi dan kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi maka strategi yang dilakukan Kecamatan Sungai Loban adalah meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dan aparat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang diiringi dengan upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan serta pendekatan yang berprinsip pemberdayaan yang mengarah kepada:

- Peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi serta peningkatan pelayanan sosial budaya dengan standar pelayanan prima.
- Menyiapkan aparatur Kecamatan dan pemerintah desa yang berlandaskan kompetensi, kredibel, inovatif, dan mampu sebagai

pelayan masyarakat, serta meningkatkan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

b. Kebijakan

Dalam mencapai kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan, dan strategi Kecamatan Kuranji terdapat beberapa kebijakan dalam bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan internal dan kebijakan eksternal.

1. Kebijakan internal

- a. Meningkatkan pembinaan kepada aparat penyelenggara pelayanan.
- b. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan secara umum.
- c. Meningkatkan standart pelayanan berupa standar pelayanan prima.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM secara terus menerus sesuai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat.

1. Kebijakan eksternal

- a. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat.
- b. Melaksanakan koordinasi teknis terkait upaya pembinaan dengan instansi terkait utamanya di tingkat kecamatan.
- c. Memfasilitas masyarakat dalam pelayanan secara umum terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh (Infrastruktur dan sarana prasarana lainnya).
- d. Peningkatan peran sektor swasta melalui program *community social responsibility* (CSR).

- e. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2018

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Loban melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target (quantitative objective) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berikutnya, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Kecamatan Sungai Loban dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan kinerja yang di komitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun 2018. Tabel RKT 2018 tertuang sebagai mana lampiran ...

2.2.3. Rencana Aksi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA (LKJ)) adalah kewajiban dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga, Laporan Kinerja (LKj) dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan tujuan, sasaran yang ingin dicapai. Secara umum dan normatif semua program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran .2018 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Program dan kegiatan guna mencapai tujuan Kecamatan Sungai Loban, sebagaimana yang dilampirkan pada Tabel Aksi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan analisis, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, pertanggung jawaban dimaksudkan dalam rangka transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dijadikan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perencanaan dengan pelaksanaan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintahan

Keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada sejauh mana capaian capaian dari target kinerja yang ditetapkan. Kantor Kecamatan Sungai Loban sebagai institusi yang diberi kewenangan memberikan pelayanan, kordinasi dan pembinaan kepada masyarakat jua dituntut untuk menyampaikan hsil hasil kerja yang dilaksanakan selama satu tahun priode anggaran yang didasarkan pada ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan. Capaian kinerja kecamatan ini akan diukur untuk mengetahui sejauh mana berdampak pada pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kecamatan ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja yaitu seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \text{ Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.0

KategoriCapaianKinerja

Urutan	Skala Ordinal	Kategori
1.	Lebih dari 90 %	SangatBerhasil
2.	81 % s.d 90 %	Baik (Berhasil)
3.	61 % s.d 80 %	CukupBerhasil
4.	Kurangdari 60 %	KurangBerhasil

2. AnalisisCapaianKinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra).

Dari penilaian yang telah dilaksanakan terhadap berbagai data dan informasi dari hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan maka diperoleh capaian kinerja terhadap 3 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Loban. Dengan katagori keberhasilan dapat di sajikan sebagai berikut:

- ☒ 1 sasaran berkategori **Sangat Berhasil** (100%);
- ☒ 1 sasaran berkategori Cukup **Berhasil** (79,836%)
- ☒ 1 Sasaran berkatagori Berhasil (83,33)

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN
		TAHUN 2018
1.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pendes	83,33%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	79,836%
3.	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan masyarakat	100%
Rata-Rata Capaian		87,722

Berdasarkan rata-rata capaian sasaran strategis tahun 2018 adalah 87.722% atau kategori capaian **“Berhasil”**. Hal ini menggambarkan terjadinya peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa dikecamatan yang sangat signifikan.

Capaian sasaran strategis untuk tahun 2018 ini merupakan capaian tahun Ketiga dalam rentang waktu Renstra Tahun 2016 – 2021, Hal ini menjadi ukuran sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan untuk menjadi rujukan penetapan target indikator kinerja ditahun tahun yang akan datang.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban untuk tiap-tiap sasaran yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
-----------	---

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun

2017 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, maka sasaran pertama dalam Renstra Kantor Kecamatan Sungai Loban adalah Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini diarahkan untuk terciptanya system pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab dan mampu menyusun system perencanaan pembangunan perdesaan menuju terciptanya kesinambungan roda pemerintahan desa, berkembangnya ekonomi kerakyatan, mampu menciptakan pekerjaan, dan tumbuhnya berbagai inovasi pengelolaan pemerintahan desa untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa

Sinergitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kecamatan diarahkan untuk mendorong upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat desa, dan terciptanya Aparatur desa yang memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Apalagi dengan adanya UU nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan otonom yang sangat besar kepada desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga diperlukan penguatan dalam pembinaan dan pendampingan,

Sebagai upaya tercapainya sasaran diatas ditentukan indikator sasaran tersebut yakni Prosentase desa dengan administrasi Baik, yang diukur dari kemampuan desa menyusun dokumen perencanaan dan administrasi lainnya, seperti RPJMDes, RKPDDes, APBDes, Musrenbangdes, Profil desa dan pelaksanaan Pilkades. Dokumen ini penting mengingat semua rencana program kerja yang akan dilaksanakan di desa tercantum dalam dokumen tersebut. Untuk lebih jelasnya capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase desa dengan administrasi baik	100%	83,33%	83,33%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian persentase desa dengan administrasi baik terealisasi 83,33% ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang menjadi indikator administrasi desa kategori baik sudah dipenuhi dan dimiliki desa sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Dari hasil evaluasi terhadap RPJMDes, RKPDDes, APBDes, Profil Desa yang dilaksanakan sejak awal tahun 2018 sudah menjadi rujukan dan pedoman semua desa untuk melaksanakan program kegiatan, sebab bila dokumen diatas belum dimiliki maka kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Proses penyusunan dokumen tersebut melalui tahapan-tahapan yang ditentukan. Dalam proses penyusunan nya dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain :

- 1) Kemampuan SDM dalam penyusunan dokumen masih rendah, karena rata-rata aparatur desa belum mendapat pelatihan khusus dalam penyusunan RPJMDes, RKPDDes, APBDes
- 2) Penyusunan narasi visi misi, tujuan sasaran, program kegiatan masih perlu perbaikan
- 3) Masih rendahnya kemampuan mengidentifikasi dan menarasikan setiap permasalahan yang ada sehingga dalam menentukan prioritas pembangunan belum tepat sasaran

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2017	2018
1	Persentase desa dengan administrasi baik	83,33%	83,33%

Capaian indikator ini ditahun 2017 juga mencapai 83,33%. Ketercapaian 83,33% ini dikarenakan dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen wajib yang

harus dimiliki setiap penyelenggaraan pemerintahan desa, target ahir dari capaian indicator ini sampai tahun berakhirnya renstra pun ditetapkan 100%, seperti terlihat dalam tabel dibawah in1

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Target Akhir Renstra Th 2021
1	Persentase desa dengan administrasi baik	83,33%	100%

Dari data diatas terlihat bahwa sampai tahun 2018 capaian indikator kinerja diatasn baru 83,33% sehingga harus ada upaya agar target capaian akhir priode renstra dapat tercapai 100%

SASARAN 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
------------------	---

Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dengan sasaran dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan public senantiasa dituntut meningkatkan kualitas pelayanan , mampu menetapkan standar layanan yang berdimensi menjaga kualitas hidup , melindungi keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik diarahkan untuk memberikan pelayanan keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap instansi publik Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek yaitu bagaimana pola penyelenggaraan (tata laksana) dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pada prinsipnya setiap pelayanan umum senantiasa harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna jasa. Akan tetapi kenyataannya untuk mengadakan perbaikan terhadap kualitas pelayanan public bukan sesuatu yang mudah

Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sederhana, terbuka, tepat dan terjangkau. Dengan mempertimbangkan beberapa unsur penting seperti pengaturan setiap bentuk pelayanan umu. Mutu

proses harus mencerminkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum.

Kantor Kecamatan Sungai loban sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada msyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan dan menyiapkan berbagai unsur dan aspek pendukung seperti kemudahan prosedur, persyaratan yang tidak berbelit belit, kejelasan dan kepastian, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan serta unsure unsure lainnya. Ukuran untuk melihat bagaimana respon dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan dilakukan dengan menyebarkan quisioner kepada penerima layanan (masyarakat). Hasil analisis koesioner tersebut dpat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	79,836%	99,78

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,24% dengan capaian menunjukkan ada 12,76% masyarakat belum puas, sehingga memerlukan usaha secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Capaian angka diatas diperoleh dari gabungan berbagai indicator seperti di bawah ini.

- A. Prosedur pelayanan, Unsur ini melihat bagaimana pendapat responden tentang kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Hasilnya menunjukan 1,00% responden mengatakan tidak mudah, 30,92% mengatakan kurang mudah, 1,50% mengatakan mudah, dan 81,50% mengatakan mudah. dan 16,00 mengatakan sangat mudah. Pada usur ini terlihat bahwa penilaian responden cukup baik namun yang perlu diperhatikan bahwa

masih ada,16,00% mengatakan kurang mudah sehingga masih diperlukan pembenahan dan penyederhanaan prosedur pelayanan.Lebih jelasnya dapat dilihat pada table dan grafik dibawah ini.

Tabel 4.2 prosedur pelayanan

PROSEDUR PELAYANAN	NILAI UNSUR%
TIDAK MUDAH	1,00
KURANG MUDAH	1.50
MUDAH	81,50
SANGAT MUDAH	16,00

- B. **Persyaratan pelayanan**, pada unsur ini ingin kesesuaian antara persyaratan teknis dan administratif yang diajukan dengan jenis pelayanan yang diterima.Hasil pengolahan data mnunjukkan bahwa 0,500% mengatakan tidak sesuai,0,500%
Mengatakan kurang sesuai,0,000 % mengatakan sesuai dan 85,000% mengatakan sangat sesuai. Pada unsure ini hasinya baik, Namun perlu juga dipertimbangkan bahwa masih terdapat, 14,500%yang mengatakan kurang sesuai. Lihat table dan grafik dibawah ini

Tabel 4.3 Persyaratan Pelayanan

PERSYARATAN PELAYANAN	NILAI UNSUR%
TIDAK SESUAI	0,500
KURANG SESUAI	0,000
SESUAI	85,000
SANGAT SESUAI	14,500

- C. Kejelasan petugas Pelayanan, Unsur ini untuk melihat keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama,jabatan serta kewenangan dan tagging jawabnya). 22,500% mengatakan tidak jelas, 0,000
mengatakan kurag jelas, 1,500% mengatakan jelas dan 76,000%mengatakan sangat jelas,lihat table dan grafik,,,,,,

Tabel4.4 kejelasa petugas pelayanan

KEJELASAN PETUGAS	NILAI UNSUR (%)
-------------------	-----------------

PELAYANAN	
TIDAK JELAS	0,000
KURANG JELAS	1,500
JELAS	76,000
SANGAT JELAS	22,500

- D. **Kedisiplinan Petugas Pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Rata-rata responden mengatakan Disiplin karena jawaban ini memperoleh skor 82,500% sementara responden yang mengatakan kurang disiplin sebanyak 0,000% seentara yang mengatakan tidak disiplin 0,000% dan 17,500% mengatakan sangat disiplin. Lihat table dan grafik dibawah ini

Tabel 4.5 kedisiplinan Petuga pelayanan

KEDISIPLINAN PETUGAS PELAYANAN	NILAI UNSUR (%)
TIDAK DISIPLIN	0,000
KURANG DISIPLIN	0,000
DISIPLIN	82,500
SANGAT DISIPLIN	17,500

- E. **Tanggung Jawab Petugas Pelayanan**, unsur ini untuk melihat kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Unsure ini jawaban yang memperoleh skortetinggi adalah pada jawaban bertanggung jawab dengan skor 78,000%. Artinya rata-rata responden cukup puas.22,000 % menjawab kurang bertanggung jawab,sementara 0,000% menjawab tidak bertaggung jawab dan 0,000 mengatakan sangat bertanggung jawab. Lihat tabel dan grafik dibawah ini

Tabel 4.6 Tanggung Jawab Petugas Pelayanan

TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELAYANAN	NILAI UNSUR(%)
-------------------------------------	----------------

TIDAK BERTANGGUNG JAWAB	0,000
KURANG BERTANGGUNG JAWAB	0,000
BERTANGGUNG JAWAB	78,000
SANGAT BERTANGGUNG JAWAB	22,000

- F. **Kemampuan Petugas Pelayanan**, Unsur ini untuk mengukur sejauh mana kemamuan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Hasilnya menunjukkan sangat baik, dimana 26,000% responden menjawab memiliki kemampuan, 74,000% mengatakan kurang mampu, 0,000% mengatakan tidak mampu dan 0,000% mengatakan sangat mampu, Lihat table dan grafik

Tabel 4.7 Kemampuan Petugas pelayanan

KEMAMPUAN PETUGAS PELAYANAN	NILAI UNSUR(%)
TIDAK MAMPU	0,000
KURANG MAMPU	0,000
MAMPU	74,000
SANGAT MAMPU	26,000

- G. **Keadilan Mendapatkan Pelayann**, Pada unsur ini ingin mengukur sikap pegawai terkait sikap adil yang ditunjukkan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat dalam memberikan pelayanan. Hasilnya 19,500% mengatakan adil, 80,500% mengatakan kurang adil, 0,000% mengatakan tidak adl dan, 0,000 % mengatakan sangat adil. Lihat tabel

Tabel 4.8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan

KEADILAN MENDAPATKAN PELAYANAN	NILAI UNSUR(%)
TIDAK ADIL	0,000
KURANG ADIL	0,000
ADIL	80,500
SANGAT ADIL	19,500

- H. **Kesopanan dan Keramahan Petugas**, Unsur ini ingin menilai sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Hasil nya terlihat bahwa 72,000 mengatakan sopan dan ramah, 0,000% mengatakan kurang sopan dan ramah, 0,000 mengatakan tidak sopan dan tidak ramah 28,000 mengatakan sangat sopan dan ramah. Lihat tabel dan grafik

Tabel 4.9 Kesopanan dan Keramahan Petugas

KESOPANAN & KERAMAHAN PETUGAS	NILAI UNSUR (%)
TIDAK SOPAN & RAMAH	0,000
KURANG SOPAN & RAMAH	0,000
SOPAN & RAMAH	72,000
SANGAT SOPAN& RAMAH	28,000

- I. **Ketepatan Pelayanan**, Unsur ini untuk mengetahui ketepatan pelayanan sesuai yang ditentukan. Hasilnya terlihat bahwa 32,000% responden mengatakan kadang-kadang tepat, kemudian 2,500% mengatakan banyak tepatnya65,500% mengatakan selalu tidak tepat, sedangkan 0,000% yang mengatakan kecepatan pelaksanaan pelayanan selalu tepat. Lihat tabel dan grafik

Tabel 4.10 Ketepatan Pelaksanaan Pelayanan

KETEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN	NILAI UNSUR (%)
SELALU TIDAK TEPAT	0,000
KADANG-KADANG TEPAT	2,500
BANYAK TETAPNYA	65,500
SELALU TEPAT	32,000

- J. **Kenyamanan Lingkungan**, Unsur ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi sarana dn prasarana menyangkut kebersihan, kerapian dan keteraturan sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Dari hasil kuesioner, sebanyak 78,000% responden yang mengatakan lingkungan nyaman, sedangkan 0,000% mengatakan kurang

nyaman. Sebanyak 21,500% mengatakan lingkungan sangat sangat nyaman dan hanya 0,000% responden yang menyatakan tidak nyaman.

Tabel 4.11 Kenyamanan Lingkungan

KENYAMANAN LINGKUNGAN	NILAI UNSUR(%)
TIDAK NYAMAN	0,000
KURANG NYAMAN	0,000
NYAMAN	78,000
SANGAT NYAMAN	21,500

- K. **Keamanan Lingkungan**, unsur ini ditunjukan untuk respon masyarakat terhadap tingkat keamanan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan. Dari hasil kuesioner, sebanyak 75,500% responden yang mengatakan lingkungan aman, sedangkan 24,000% menyatakan selalu aman. Sebanyak 0,500 % mengatakan lingkungan kurang aman dan hanya 0,000% responden yang menyatakan tidak aman.

Tabel 4.12 Keamanan Lingkungan

KEAMANAN LINGKUNGAN	NILAI UNSUR (%)
TIDAK AMAN	0,000
KURANG AMAN	0,500
AMAN	75,500
SELALU AMAN	24,000

- L. **Kecepatan Pelayanan**, unsur ini untuk mengetahui tingkat kecepatan dari pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner, responden yang menyatakan pelayanan kurang cepat. Sebanyak 3,500% sedangkan 77,000% mengatakan pelayanan cepat. Sebanyak 1,000% mengatakan pelayanan tidak cepat dan 18,500% yang mengatakan sangat sesuai.

Tabel 4.13 Kecepatan Pelayanan

KECEPATAN PELAYANAN	NILAI UNSUR (%)
TIDAK CEPAT	1,000

KURANG CEPAT	3,500
CEPAT	77,000
SANGAT SESUAI	18,500

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2017	2018	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		79,83	

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	99.7	99.78

SASARAN 3	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Publik
-----------	---

Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan public juga menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tupoksi sebagai fasilitator, kordinasi, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat. Terciptanya suasana kehidupan yang damai, aman, sejuk menjadi sebuah modal social yang mendukung harmonisasi dan kondusifnya interaksi social antar komponen msyarakat, terlaksananya fungsi fungsi pemerintahan disemua hirarki serta terciptanya suasana kehidupan yang penuh toleransi, saling menghargai, dan mengedepankan permusawarahan dalam penyelesaian masalah. Sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dalam semua aspk

Selama tahun 2018 kondisi atau capaian pada indikator Ketertiban, Keamanan, dan kenyamanan public menunjukkan capaian yang menggembirakan karena indikator terjadinya ketidakamanan, ketidaktertiban dan ketidaknyamanan masih rendah, terjadinya gangguan terhadap keamanan ketertiban dan kenyamanan masyarakat masih dalam batas toleransi. Dalam mendukung tercapainya angka indikator ini yang didasarkan pada beberapa ukuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Capaian Wilayah Tertib K3	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator ini sebesar 100% Hal ini menunjukkan bahwa Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat cukup terkendali. Dari 17 Desa yang ada telah memiliki petugas Linmas masing masing desa 10 org, dan tersedianya poskamling untuk menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat sebanyak 136 yang tersebar di 17 desa, disamping itu telah memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi beberapa perda antara lain Perda 11 tahun 2016 tentang angkutan jalan perdesaan, penanganan keamanan dan ketertiban seperti penertiban warung remang remang, memfasilitasi pemulangan PSK. Selain hal diatas dilakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk pertemuan pertemuan pentingnya menjaga kerukunan ketertiban dan keamanan lingkungan, Hal ini untuk mendukung dan mendorong semakin meningkatnya kesadaran, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam setiap usaha menciptakan ketertiban, Keamanan dan kenyamanan.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan Wilayah Tertib K3	100%	100%	100%

Capaian tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yakni sebesar 100%, hal ini disebabkan karena petugas linmas dan jumlah poskamling di semua desa tidak mengalami perubahan. Hal ini

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan Wilayah Tertib K3	100%	100%	100%

B. Eselon IV

Kasi Pemerintahan

Seksi ini memiliki tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan pemerintahan, terutama terkait pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara teknis terkait keadministrasian dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan desa. Dari tugas diatas maka telah disusun sasaran kinerja seksi Pemerintahan yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sungai Loban. Capaian dari sasaran kinerja seksi Pemerintahan di Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 (Seksi Pemerintahan) Tahun 2018

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RPJMDes	Jumlah Dokumen RPJMDes	17 Dok	17 Dok	100
2.	Terlaksananya Kordinasi Penyusunan RKPDes	Jumlah Dokumen RKPDes	17 Dok	17 Dok	100
3.	Terlaksananya Kordinasi Penyusunan APBDes	Jumlah Dokumen APBDes	17 Dok	17 Dok	100
4	Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	17 Dok	17 Dok	100
5	Terlaksananya	Jumlah Dokumen	17	17 Dok	100

	Kordinasi Penyusunan Musrenbangdes	MusrenbangDes	Dok		
6	Terlaksananya Kordinasi Pelaksanaan Pilkades	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	0	0	0
		Prosentase			83,33%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja seksi pemerintahan sebesar 83,33%. Dari target 100%, artinya masih terdapat satu indicator yang memang belum terlaksana yakni tidak adanya kepala desa yang masa kerja berakhir, artinya tidak ada kegiatan pemilihan Kepala Desa, sehingga capaian indikator ini masih Nol.

2. Kasie Pemas Kesos

Pada Seksi Pemas Kesos fokus pada pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social, berbagai jenis kegiatan yang menjadi obyek pemberdayaan menyangkut pemberdayan keluarga, masyarakat, dan perlindungan anak, pembinaan keluarga sejahtera, penyandang masalah social penyelenggaraan kegiatan keagamaan, serta pebinaan kesehatan masyarakat dan posyandu. Sehingga ditetapkan indicator kinerja seksi Pemas Kessos seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 (Seksi Pemas Kesos) Tahun 2018

No	KinerjaUtama	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan layanan kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan Aktif	24	22 bh	91,66%
2.	Terlaksananya Kordinasi Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan social	Jumlah Penyandang PMKS yang difasilitasi mendapatkan bantuan	6.877	7.272	105,74
3.	Terlaksananya Kordinasi Penyelenggaraan kegiatan Kegamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan	108	108	100
		Prosentase			99,13

Dari data diatas terlihat bahwa capaian kinerja seksi pemas kessos sebesar

99,13%, prosentase ini diperoleh dari penggabungan tiga kinerja utama. Yakni kordinasi penyelenggaraan layanan kesehatan yang terdiri dari layanan Puskesmas 1 Unit, Polindes 7 unit, Layanan Poskesdes 10 Unit dan Posyandu 19 unit. Kordinasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan terdiri dari Rastra 1063 orang, PKH 205 orang, Subsidi Elpiji 1595 orang, Penyandang disabilitas 5 orang, bedah rumah 5 orang, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) 4399 orang. Sementara kordinasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan terdiri dari Hari Besar Islam, Hari Besar Hindu, hari besar Kristen.

3. Kasi Pelayanan

Seksi ini fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait perizinan dan non perizinan melalui mekanisme Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu), beberapa item perizinan dan non perizinan yang diberikan kewenangan untuk diterbitkan atau menyeleksi kesempurnaan berbagai persyaratan pengajuan administrasi kependudukan. Indikator kinerja yang ditetapkan pada seksi ini seperti terlihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 (Seksi Pelayanan) Tahun 2018

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya fasilitasi penerbitan Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan	725 dok	748 Dok	103
2.	Terlaksananya penerbitan non perizinan	Jumlah Dokumen non perizinan	2110 dok	2193 Dok	103,93
		Prosentase			103,46

Dari tabel diatas dapat ggggg

4. Kasi Sarana Prasarana

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 (Seksi Sarana Prasarana) Tahun 2018

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendataan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan	Jumlah dokumen laporan	300 dok	310	100,10
		Prosentase			

5. Kasi Ketenraman dan Ketertiban

Tabel 3....
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 (Kasi Ketenraman dan Ketertiban)
Tahun 2018

No	KinerjaUtama	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang aktif Linmas dan siskamling			
2.	Terlaksananya Koordinasi penanganan keamanan dan ketertiban	Jumlah kegiatan penanganan keamanan dan ketertiban yang difasilitasi			
3.	Terlaksananya Koordinasi Sosialisasi penegakan UU, PP, Perda, Perbup	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			
		Prosentase			83,33%

3.2 REALISASI ANGGARAN

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Ada 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 secara keseluruhan cukup mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2018 pada hakekatnya karena berkat limpahan rahmat dan karunia Allah Swt. dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2018 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum Optimal. Sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016- 2021 yang diselaraskan dengan Program dan Indikator Mikro Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Sari Mulya, 3 Januari 2018

Desa Mat Sungai Loban,



Samsir, SE, MAP

Penata Tk. I

Nip. 19760109 200312 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Samsir, SE, MAP**
Jabatan : **Camat Sungai Loban**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **Mardani H. Maming**
Jabatan : **Bupati Tanah Bumbu**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Mardani H. Maming

Sungai Loban, 16 Januari 2018
Pihak Pertama

Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Baik	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%
3	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan di Masyarakat	Cakupan wilayah tertib K3	100%
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	758,193,850	DPA Perubahan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51,700,000	DPA Perubahan
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	23,820,000	DPA Perubahan
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	22,000,000	DPA Perubahan
5	Program Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat	216,810,000	DPA Perubahan

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

Sungai Loban, 16 Januari 2018
Camat Sungai Loban

Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mutawally, SE**
Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

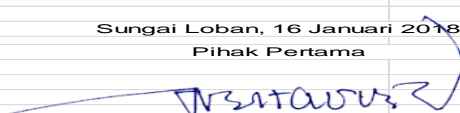
Nama : **Samsir, SE, MAP**
Jabatan : Camat Sungai Loban,

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

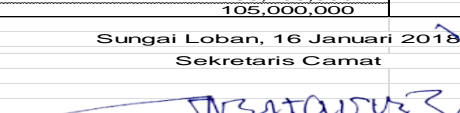
Sungai Loban, 16 Januari 2018
Pihak Pertama

Mutawally, SE
Penata Tk. I
NIP. 19690801 200701 1 046

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan tatakelola keuangan SKPD	- Persentase kesesuaian penetapan program/kegiatan terhadap Renja SKPD - Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100% 100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana aparatur dan kepegawaian SKPD	- Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik - Persentase urusan kepegawaian ASN dapat terlayani dengan baik	75% 75%
3	Meningkatnya kualitas data informasi dan pelaporan SKPD	Nilai LKj SKPD	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	758,193,850	DPA Perubahan
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13,800,000	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21,600,000	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	161,700,000	
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,141,500	
	- Penyediaan alat tulis kantor	10,819,350	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,298,000	
	- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,290,000	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2,280,000	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,050,000	
	- Penyediaan makanan dan minuman	46,620,000	
	- Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	122,400,000	
	- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	255,195,000	
	- Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah	105,000,000	


Camat Sungai Loban,
Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

Sungai Loban, 16 Januari 2018
Sekretaris Camat

Mutawally, SE
Penata Tk. I
NIP. 19690801 200701 1 046



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Putu Sudarma, S.Sos**
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **Samsir, SE, MAP**
Jabatan : Camat Sungai Loban

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

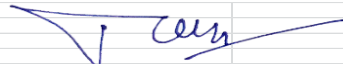
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

Sungai Loban, 16 Januari 2018

Pihak Pertama



I Putu Sudarma, S.Sos
Penata Muda Tk. I
NIP. 19810407 200701 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RPJMDes	Jumlah Dokumen RPJMDes	17 Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RKPDes	Jumlah Dokumen RKPDes	17 Dokumen
3	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan APBDDes	Jumlah Dokumen APBDDes	17 Dokumen
4	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	17 Dokumen
5	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Musrenbangdes	Jumlah Dokumen Musrenbangdes	17 Dokumen
6	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pilkades	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	0

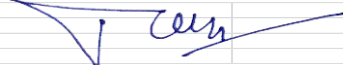
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		
-	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	9,500,000	DPA Perubahan
-	Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	12,500,000	DPA Perubahan
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
-	Penyediaan alat tulis kantor	10,819,350	DPA Perubahan
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,298,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2,280,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,050,000	DPA Perubahan
-	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	122,400,000	DPA Perubahan
-	Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah	105,000,000	DPA Perubahan



Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

Sungai Loban, 16 Januari 2018

Kasi Pemerintahan



I Putu Sudarma, S.Sos
Penata Muda Tk. I
NIP. 19810407 200701 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Irfanie, S.Pd.MM**

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masy dan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **Samsir, SE, MAP**

Jabatan : Camat Sungai Loban

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005


Sungai Loban, 16 Januari 2018


Pihak Pertama
Muhammad Irfanie, S.Pd.MM
Pembina
NIP. 19610805 198305 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Posyandu	Jumlah posyandu aktif	24 Posyandu
2	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang difasilitasi mendapatkan bantuan	6877 PMKS
3	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	108 Kegiatan
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat		
	- Penyelenggaraan MTQ	216,810,000	DPA Perubahan
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	- Penyediaan alat tulis kantor	10,819,350	DPA Perubahan
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,298,000	DPA Perubahan
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2,280,000	DPA Perubahan
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,050,000	DPA Perubahan
	- Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	122,400,000	DPA Perubahan
	- Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah	105,000,000	DPA Perubahan


Camat Sungai Loban
Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

Sungai Loban, 16 Januari 2018

Kasi Pemberdayaan Masy dan Kesejahteraan Sosial

Muhammad Irfanie, S.Pd.MM
Pembina
NIP. 19610805 198305 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syam'ani Noor, S.Sos**
Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **Samsir, SE, MAP**
Jabatan : Camat Sungai Loban

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

Sungai Loban, 16 Januari 2018

Pihak Pertama

Syam'ani Noor, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19680101 199002 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Perizinan	Jumlah dokumen Perizinan yang diterbitkan	748 Dokumen
2	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Non Perizinan	Jumlah Rekomendasi Non Perizinan yang diterbitkan	2193 Dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
-	Penyediaan jasa administrasi keuangan	161,700,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,141,500	DPA Perubahan
-	Penyediaan alat tulis kantor	10,819,350	DPA Perubahan
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,298,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2,280,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,050,000	DPA Perubahan
-	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	122,400,000	DPA Perubahan
-	Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah	105,000,000	DPA Perubahan



Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

Sungai Loban, 16 Januari 2018

Kasi Pelayanan Umum

Syam'ani Noor, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19680101 199002 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rahmani, S.Sos**
Jabatan : Kasi Prasarana Sarana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **Samsir, SE, MAP**
Jabatan : Camat Sungai Loban

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

Sungai Loban, 16 Januari 2018
Pihak Pertama

Rahmani, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19690412 199303 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Pendataan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan	Jumlah dokumen laporan	3 Dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	- Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	50,000,000	DPA Perubahan
	- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor	1,700,000	DPA Perubahan
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	- Penyediaan alat tulis kantor	10,819,350	DPA Perubahan
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,298,000	DPA Perubahan
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2,280,000	DPA Perubahan
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,050,000	DPA Perubahan
	- Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	122,400,000	DPA Perubahan
	- Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah	105,000,000	DPA Perubahan



Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

Sungai Loban, 16 Januari 2018
Kasi Prasarana Sarana

Rahmani, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19690412 199303 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fathurahman**
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;


Nama : **Samsir, SE, MAP**
Jabatan : Camat Sungai Loban

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua
Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

Sungai Loban, 16 Januari 2018
Pihak Pertama

Fathurahman
Penata Muda Tk. I
NIP. 19601114 199103 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang aktif Linmas dan siskamling	17 Desa
2	Terlaksananya Koordinasi penanganan keamanan dan ketertiban	Jumlah kegiatan penanganan keamanan dan ketertiban yang difasilitasi	17 Desa
3	Terlaksananya Koordinasi Sosialisasi penegakan UU, PP, Perda, Perbup	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	5 kali

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		
-	Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban (Kantibnas)	23,820,000	DPA Perubahan
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
-	Penyediaan alat tulis kantor	10,819,350	DPA Perubahan
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,298,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2,280,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,050,000	DPA Perubahan
-	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	122,400,000	DPA Perubahan
-	Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah	105,000,000	DPA Perubahan


Camat Sungai Loban
Samsir, SE, MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760109 200312 1 005

Sungai Loban, 16 Januari 2018
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Fathurahman
Penata Muda Tk. I
NIP. 19601114 199103 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Gede Budiana, SE, MA**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **Mutawally, SE**
Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Mutawally, SE
Penata Tk. I
NIP. 19690801 200701 1 046

Sungai Loban, 16 Januari 2018

Pihak Pertama

I Gede Budiana, SE, MA
Penata
NIP. 19770202 201001 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Fasilitasi penyusunan Program dan Rencana Kerja SKPD	- Jumlah dokumen Rensta SKPD	1 Dokumen
		- Jumlah dokumen Renja SKPD	1 Dokumen
		- Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen
2	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran SKPD	1 Dokumen
3	Fasilitasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen LKj	1 Dokumen
		- Jumlah dokumen LPPD	1 Dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13,800,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21,600,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan jasa administrasi	161,700,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,141,500	DPA Perubahan
-	Penyediaan alat tulis kantor	10,819,350	DPA Perubahan
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,298,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,290,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2,280,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan makanan dan minuman	46,620,000	DPA Perubahan
-	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	122,400,000	DPA Perubahan
-	Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah	105,000,000	DPA Perubahan

Sekretaris Camat

Mutawally, SE
Penata Tk. I
NIP. 19690801 200701 1 046

Sungai Loban, 16 Januari 2018

Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

I Gede Budiana, SE, MA
Penata
NIP. 19770202 201001 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuni Widayanti, S.Sos**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **Mutawally, SE**
Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Mutawally, SE
Penata Tk. I
NIP. 19690801 200701 1 046

Sungai Loban, 16 Januari 2018

Pihak Pertama

Yuni Widayanti, S.Sos
Penata Muda
NIP. 19830621 200903 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Fasilitasi pengelolaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan SKPD	- Jumlah surat masuk dan keluar - Jumlah sarana alat kantor yang tersedia sesuai keperluan unit organisasi	1500 surat 18 alat
2	Fasilitasi pengelolaan urusan kepegawaian SKPD	- Jumlah dokumen laporan barang milih daerah/negara - Jumlah dokumen laporan pembinaan kepegawaian - Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian - Jumlah dokumen laporan usulan mutasi kepegawaian - Jumlah dokumen laporan LKHKPN - Jumlah dokumen laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 9 Dokumen 32 Dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13,800,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21,600,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan jasa administrasi	161,700,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,141,500	DPA Perubahan
-	Penyediaan alat tulis kantor	10,819,350	DPA Perubahan
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,298,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,290,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2,280,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,050,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan makanan dan minuman	46,620,000	DPA Perubahan
-	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	122,400,000	DPA Perubahan
-	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	255,195,000	DPA Perubahan
-	Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah	105,000,000	

Sekretaris Camat

Mutawally, SE
Penata Tk. I
NIP. 19690801 200701 1 046

Sungai Loban, 16 Januari 2018
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Yuni Widayanti, S.Sos
Penata Muda
NIP. 19830621 200903 2 011

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2018																										
TRIWULAN IV																										
KECAMATAN SUNGAI LOBAN																										
No	Kode Rekening	Uraian/Bidang Uraian Pembahasan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Rencana SKPD pada Tahun 2020 (Akar Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2017 (n-2)		Target kinerja dan anggaran kegiatan tahun 2018 (tahun n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang direvisi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2018/Akar Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab		Ket				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.07.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
4.01.4.01.07.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terdapatnya rekening kantor (bulan)	60,00	58.440,000	24,00	20.640,000	12	13.800,000	2	602,500	4	3.743,396	3	2.263,148	3	2.767,864	12	9.376,908	100,00%	67,95%	36,00	30.016,908	60,00%	51,36%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (%)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (%)	100,00	29.538,000	100,00	29.538,000											100,00	29.538,000	100,00%	100,00%				Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	33,00	84.200,000	8,00	18.600,000	9	21.600,000	2	3.000,000	2	4.488,000	3	4.482,000	2	7.813,700	9	19.783,700	100,00%	91,59%	17,00	38.383,700	51,52%	45,59%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terdapatnya jasa administrasi keuangan (bulan)	60,00	752.583,000	24,00	215.523,000	12	161.700,000	2	13.960,000	4	96.110,000	3	22.570,000	3	29.060,000	12	161.700,000	100,00%	100,00%	36,00	377.223,000	60,00%	50,10%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.01.08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terdapatnya alat, bahan dan jasa kebersihan kantor (%)	100,00	2.631,000	100,00	2.631,000											100,00	2.631,000	100,00%	100,00%				Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terdapatnya alat, bahan dan jasa kebersihan kantor (bulan)	48,00	10.503,000	12,00	2.691,500	12	3.141,500	2	757,000	4	1.084,000	3	1.200,500	12	3.141,500	100,00%	100,00%	24,00	5.833,000	90,00%	55,53%		Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Terdapatnya alat tulis kantor (bulan)	315,00	10.992,350	315,00	10.992,350											315,00	10.992,350	100,00%	100,00%				Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Terdapatnya alat tulis kantor (bulan)	48,00	47.340,550	12,00	10.819,350	12	10.819,350	2	2.150,550	4	2.492,100	3	870,800	3	5.305,900	12	10.819,350	100,00%	100,00%	24,00	21.636,700	90,00%	45,71%	Tidak Ada
1.20.1.20.11.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terdapatnya perbaikan/perlangkapan kerja (%)	100,00	3.300,000	100,00	3.300,000											100,00	3.300,000	100,00%	100,00%				Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Terdapatnya barang cetakan dan penggantian (bulan)	35.004,00	6.500,000	35.004,00	6.500,000											35.004,00	6.500,000	100,00%	100,00%				Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Terdapatnya barang cetakan dan penggantian (bulan)	48,00	41.733,500	12,00	10.100,000	12	9.298,000	2	774,750	4	3.004,500	3	1.551,000	3	3.967,750	12	9.298,000	100,00%	100,00%	24,00	19.398,000	90,00%	46,48%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.01.12		Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terdapatnya alat listrik kantor (bulan)	102,00	2.120,000	102,00	2.120,000											102,00	2.120,000	100,00%	100,00%				Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.12		Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terdapatnya alat listrik kantor (bulan)	48,00	7.860,000	12,00	1.290,000	12	1.290,000	2	655,000	4	-	2	-	4	635,000	12	1.290,000	100,00%	100,00%	24,00	2.580,000	90,00%	32,82%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja (unit)	105,00	62.329,650	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.15		Penyediaan bahan bakar dan pemenuhan pemenuhan bangunan	Terdapatnya rekening surat kabar (bulan)	48,00	9.120,000	12,00	2.280,000											48,00	9.120,000	100,00%	100,00%	24,00	4.560,000	90,00%	50,00%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.01.16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terdapatnya bahan logistik kantor (bulan)	34,00	10.100,000	0,00	-	12	5.050,000	2	825,000	4	840,000	2	935,000	4	2.450,000	12	5.050,000	100,00%	100,00%	12,00	5.050,000	90,00%	50,00%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Terdapatnya makanan dan minuman (bulan)	22.150,00	330.830,000	13.700,00	111.000,000	2220	46.620,000	574	12.054,000	369	7.518,000	725	7.728,000	566	19.320,000	2.220	46.620,000	100,00%	100,00%	15.820,00	157.620,000	71,87%	47,64%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.01.18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (%)	100,00	24.870,000	100,00	24.870,000											100,00	24.870,000	100,00%	100,00%				Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (bulan)	69,00	381.500,000	21,00	46.660,000	19	122.400,000	4	9.720,000	4	24.520,800	5	44.885,800	6	27.083,300	19	106.209,900	100,00%	86,77%	40,00	152.809,900	97,97%	40,01%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.01.19		Penyediaan Jasa Tempa Non PHS	Terdapatnya jasa Non PHS (bulan)	130,00	210.800,000	130,00	210.800,000											130,00	210.800,000	100,00%	100,00%				Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.19		Penyediaan Jasa Tempa Non PHS	Terdapatnya jasa Non PHS (bulan)	52,00	879.858,200	13,00	208.200,000	13	255.195,000	2	31.400,000	5	62.800,000	3	47.295,000	3	63.000,000	13	204.495,000	100,00%	80,13%	26,00	412.695,000	90,00%	46,90%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.01.22		Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah (%)	100,00	31.700,000	100,00	31.700,000											100,00	31.700,000	100,00%	100,00%				Tidak Ada	
4.01.4.01.07.01.22		Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah (bulan)	3155,00	444.305,000	960,00	107.550,000	700	105,000,000	59	8.800,000	281	42.050,000	123	27.875,000	237	26.425,000	700	105,000,000	100,00%	100,00%	1.660,00	212.550,000	52,61%	47,84%	Tidak Ada
									758.193,850																	
4.01.4.01.07.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								
4.01.4.01.07.02.22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terdapatnya gedung kantor (unit)	5,00	200.000,000	2,00	60.000,000	1	50.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000,000	100,00%	100,00%	3,00	110.000,000	60,00%	55,00%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.02.21		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terdapatnya rumah dinas (unit)	5,00	102.000,000	2,00	30.000,000											-	-	0,00%	0,00%	2,00	30.000,000	40,00%	29,41%	Tidak Ada
4.01.4.01.07.02.31		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)	52,00	28.300,000	16,00	4.600,000	5	1.700,000	-	-	5	1.700,000	-	-	-	-	5	1.700,000	100,00%	100,00%	21,00	6.300,000	40,38%	22,26%	Tidak Ada
1.20.1.20.11.03		Program Peningkatan Statistik Aparatur																								
1.20.1.20.11.03.05		Pengadaan Pakaian Khusus (uniform) berkala	Jumlah pakaian khusus yang dibeli (bulan)	30,00	15.700,000	30,00	15.700,000																			